**ANALISIS PERANAN STAKEHOLDER DALAM PENATAAN
KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
PERIKANAN KOTA DUMAI PROVINSI RIAU**

Hazmi Arief*¹, Ulfa Rizki Pradini²

^{1,2}Universitas Riau; Jl. HR Subrantas KM 12,5 Pekanbaru, Riau

Email : *¹hazmi_arief@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018 yang berlokasi di Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peranan *stakeholder* dalam penataan kelembagaan perikanan yang ada di Dumai dan merumuskan strategi pengembangan sektor perikanan kota Dumai secara terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan responden kelembagaan yaitu pelaku utama perikanan dan *stakeholder* yang terkait langsung dengan sektor perikanan, penentuan responden dengan cara *purposive sampling*. Hasil penelitian diketahui bahwa komponen kelembagaan yang berfungsi sebagai penyokong utama kegiatan yaitu kelompok nelayan, sementara lembaga pemasaran dan lembaga keuangan belum memberikan kontribusi yang jelas dalam mendukung pembangunan perikanan kota Dumai. Hasil analisis *stakeholder* menetapkan peran *stakeholder* masih sangat dibutuhkan untuk penataan kelembagaan perikanan, dengan berfungsinya lembaga pemasaran sebagai penyokong dengan rentabilitas yang saling menguntungkan, dan masuknya lembaga keuangan ke sektor perikanan untuk meminimalisir peran tengkulak. Hasil analisis SWOT strategi pengembangan perikanan tangkap Kota Dumai dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang yang ada yaitu Pemberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan untuk optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang ada, optimalisasi pemanfaatan fasilitas penunjang perikanan sebagai media peningkatan pendapatan nelayan, penguatan permodalan usaha nelayan dengan memanfaatkan program pemerintah maupun lembaga permodalan swasta yang ada, memenuhi peluang pasar yang telah ada.

Kata kunci : Stakeholder, Kelembagaan, Perikanan tangkap

ABSTRACT

This research was conducted in April 2018 located in Dumai City. This study aims to determine the role of stakeholders in structuring fisheries institutions in Dumai and formulating Dumai city fisheries sector development strategies in an integrated manner. The method used in this study is survey method with institutional respondents, namely the main actors of fisheries and stakeholders directly related to the fisheries sector, determining respondents by purposive sampling. The results of the study revealed that the institutional component that serves as the main supporter of activities is the fishermen group, while marketing institutions and financial institutions have not made a clear contribution in supporting the fisheries development in Dumai city. The results of stakeholder analysis determine the role of stakeholders is still very much needed for structuring fisheries institutions, with the functioning of marketing institutions as a supporter with mutual benefits, and the entry of financial institutions into the fisheries sector to minimize the role of middlemen. The results of the SWOT

analysis of Dumai City's fishing development strategy were carried out by using the power they had to achieve the existing opportunities namely Empowerment of fishermen groups through institutional strengthening to optimize the utilization existing fishery resource potentials, optimization of utilization of fisheries supporting facilities as a medium to increase fishermen's income, strengthen business capital fishermen by utilizing existing government programs and private capital institutions, fulfilling existing market opportunities.

Keywords: *Stakeholders, Institutions, Fishing*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km² yang memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi lestari sumber daya ikan atau *maximum sustainable yield* (MSY) di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton/tahun (80% dari MSY). Kemudian, untuk besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya, diperkirakan mencapai 0,9 juta ton ikan/tahun. Sementara, untuk perikanan budidaya, potensi yang dimilikinya adalah perikanan budidaya air laut seluas 8,3 juta Ha, perikanan budidaya air payau atau tambak seluas 1,3 juta Ha, dan perikanan budidaya air tawar seluas 2,2 juta Ha, perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa) seluas 158,2 ribu Ha, dan sawah untuk mina padi seluas 1,55 juta Ha). Berdasarkan data FAO (2014) pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap dan peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya di dunia. Fakta ini dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia sangat

besar, sehingga bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab agar kegiatannya dapat berkelanjutan, maka dapat menjadi sebagai salah satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang.

Indonesia memiliki perangkat legalitas formal perundangan dalam pengelolaan perikanan. Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada Undang-Undang No. 45 tahun 2009. Secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu: (1) dimensi sumber daya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri (Charles, 2001).

Dengan merujuk Undang-Undang tersebut, peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemerataan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Kondisi ini bila ditelaah bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan sistem pengelolaan yang ada, perlu penanganan secara terpadu di seluruh sektor kegiatan ekonomi

perikanan. Disamping itu paket manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan dengan luas wilayah tangkapan ikan belum dikelola secara maksimal dengan melibatkan potensi masyarakat nelayan sebagai pelaku ekonomi di sektor perikanan.

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau, dengan luas Wilayah 1.727,38 Km² dan luas lautan 1.302.40 Km² yang terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan dan Medang Kampai. Mengacu kepada undang-undang No. 22 tahun 2005 tentang otonomi daerah dimana batas kewenangan pengelolaan Kabupaten/Kota sejauh 4 mil karena nelayan di perairan Kota Dumai biasanya melakukan penangkapan terbatas pada kawasan perairan dengan jarak 2 mil dari pantai sementara kewenangan Kabupaten/Kota sejauh 4 mil dari pantai, agar kegiatan penangkapan tidak hanya terkonsentrasi dekat dengan pantai supaya kondisi sumberdayanya dapat berangsur pulih.

Kondisi Perikanan Kota Dumai hampir keseluruhan produksinya berasal dari usaha perikanan laut dengan persentase sekitar 93% dan sisanya pada perikanan budidaya dan lainnya. Dimana produksi perikanan yang diperoleh dari hasil tangkapan tahun 2010–2018 mengalami penurunan hampir 40% (Statistik Perikanan Kota Dumai, 2017). Secara umum kondisi ini tergambar dari tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang menurun secara drastis hal ini terlihat jelas dari kondisi kelembagaan dalam kelompok yang mengakomodir tingkat kepentingan nelayan sulit untuk berkembang dan maju. Fenomena ini semakin parah lagi dengan adanya program-program yang bersifat *top-*

down atau yang hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu atau pemangku kebijakan yang tanpa berpihak kepada masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

Pengelolaan sumber daya perikanan, selama ini bersifat terpusat (*centralized government management/CGM*), yang mempunyai andil besar dalam kegagalan pengelolaan. Beberapa hal yang mencirikan terjadinya pola CGM dalam pengelolaan sumberdaya perikanan diantaranya, yaitu kebebasan akses dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berstatus publik akan menyebabkan degradasi pada sumberdaya (*overfishing*) sehingga menyebabkan masalah besar yang ditanggung bersama.

Dengan bergulirnya otonomi daerah maka seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau saat ini berbenah untuk mengembangkan dan menggali potensi masing-masing wilayah. Salah satu potensi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan adalah pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan merupakan jawaban yang tepat dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.

Pembinaan dan pengembangan masyarakat pesisir akan berhasil hanya jika *stakeholder* utamanya ikut dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan. Secara parsial pembangunan sektor kelautan dan perikanan belum berhasil dalam pemeratakan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup serta kesempatan berusaha diantara pelaku ekonomi perikanan.

Hal ini berarti kondisi sosial ekonomi masyarakat di pesisir sebagai salah satu pelaku ekonomi perikanan belum banyak mengalami perubahan. Berdasarkan kondisi masyarakat yang masih termarginalkan tersebut, maka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat merupakan paradigma yang penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan saat ini. Masyarakat dengan potensi sosialnya (*social capital*) serta pemerintah dengan kebijakannya, secara bersama-sama akan memberikan kekuatan terhadap sumberdaya dan pengelolaannya.

Berdasarkan pada beberapa isu tersebut, Pemerintah Kota Dumai telah memfasilitasi berbagai program peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah pesisir. Program ini diharapkan membuka akses masyarakat pesisir pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan perikanan dengan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pesisir dan perikanan.

Prioritas pengembangan usaha perikanan Kota Dumai yang dilakukan secara terpadu, harus mengacu pada suatu pola yang tepat, jelas dan komprehensif yang dapat merancang suatu pola pengembangan usaha perikanan yang optimal. Upaya pengendalian dan penataan kembali aktivitas usaha perikanan tangkap di Perairan Kota Dumai terutamanya setelah terjadinya penurunan produksi dalam pemanfaatan sumber daya ikan perlu dilakukan dengan menyusun suatu pola pengembangan usaha perikanan tangkap unggulan begitu juga dengan usaha perikanan lainnya yang ada di Kota Dumai. Sehubungan dengan itu masih banyak permasalahan mendasar yang masih menyelimuti sektor perikanan dewasa ini, antara lain :

1. Rendahnya pendapatan nelayan,

rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan berusaha serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang,

2. Belum seimbangnya pemanfaatan sumberdaya alam, misalnya: usaha penangkapan intensif baru dilakukan terbatas pada perairan yang sempit seperti perairan umum, perairan pantai, sedangkan perairan lepas pantai dan laut lepas belum dijamah secara intensif.
3. Usaha perikanan masih bersifat subsisten/artisanal dan berskala kecil yaitu lebih dari 90%.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran *stakeholder* dalam penataan kelembagaan untuk pembangunan sektor perikanan Kota Dumai.
2. Untuk merumuskan strategi pengembangan sektor perikanan Kota Dumai secara terpadu.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penelusuran data sekunder dengan studi dokumentasi dan data primer dilakukan dengan metode survei dengan alat bantu kuesioner yang dipersiapkan. Pengambilan sampel (*sampling*) pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau pemilihan responden dengan sengaja. Sampel untuk kelembagaan terdiri dari Kelompok Nelayan, Lembaga Pemasaran, Lembaga Keuangan dan sampel untuk *stakeholder* masing-masing mewakili Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Pemerintah Daerah Kota Dumai, Bappeda Kota Dumai, Pengusaha perikanan di Dumai,

Investor/pengusaha luar, Akademisi, Pemilik usaha lokal, masyarakat lokal dan nelayan.

2.2. Pemilihan Lokasi dan Teknik Sampling

Pemilihan lokasi penelitian secara survei yakni memilih Kota Dumai sebagai obyek. Pemilihan Kota Dumai menjadi objek penelitian didasari karena Kota Dumai merupakan daerah yang memiliki potensi perikanan dan salah satu daerah pengembangan usaha perikanan di Provinsi Riau. Objek penelitian adalah stakeholder dan kelembagaan sebagai pelaku utama dalam usaha perikanan di Kota Dumai.

2.3. Metode Analisis Data

Merumuskan analisis stakeholder kelembagaan dan dalam pengembangan perikanan Kota Dumai dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis stakeholder dalam menata kelembagaan perikanan yang berperan dalam menunjang keberlangsungan usaha dan pendapatan pada pelaku utama. Stakeholder yang berperan dalam pembangunan perikanan Kota Dumai (tujuan pertama) dianalisis dengan menggunakan analisis stakeholder, sejumlah stakeholder yang terlibat dalam kegiatan pengembangan perikanan masing-masing dipetakan berdasarkan penilaian atas tingkat kepentingan (importance) dengan pengambil keputusan dari substansi kebijakan yang akan diputuskan dan tingkat pengaruhnya (influence) pada proses penyusunan kebijakan sedangkan pada tujuan kedua mengetahui rumusan strategi pengembangan perikanan Kota Dumai dianalisis menggunakan analisis SWOT.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kelembagaan

3.1.1. Kelembagaan Perikanan Prioritas (Perikanan Tangkap) Kota Dumai

Kelembagaan atau pranata sosial merupakan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Sanim, 2002). Komponen kelembagaan dalam penelitian ini terdiri atas, kelompok nelayan, lembaga pemasaran, lembaga permodalan, dan aturan tidak tertulis dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kota Dumai.

Pelaku utama yang dominan dari perikanan yang ada di Kota Dumai adalah nelayan sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan sistem interaksi yang harmoni dalam masyarakat dan memberikan pegangan dalam kontrol sosial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa baik nelayan pendatang maupun lokal, mekanisme interaksi sosial berlangsung secara bersama-sama, dimana selain berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan usaha perikanan, beberapa nelayan juga memiliki peran dalam masyarakat sebagai pengatur desanya.

Kondisi masyarakat nelayan Kota Dumai tidak jauh berbeda dengan nelayan-nelayan di Indonesia pada umumnya yaitu nelayan kecil dengan modal tenaga dan alat tangkap sederhana, berpendidikan rendah, kurang informasi pasar dan terjebak dalam hubungan informal yang kuat antara nelayan dengan tauke (pengumpul).

Pemasaran hasil perikanan di PPI Dumai lebih banyak dikuasai oleh penduduk lokal, kecuali untuk jenis ikan besar. Pemasaran hasil perikanan disamping kebutuhan di pasar lokal juga untuk ekspor. Ekspor hasil perikanan terutama ke Malaysia. Pemasaran ikan di pasar lokal umumnya berasal dari

hasil tangkapan nelayan Kota Dumai, serta produksi ikan dari budidaya air tawar. Sementara ekspor hasil perikanan yang dilakukan melalui pelabuhan Dumai sebagian besar adalah produksi perikanan tangkap yang berasal dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pengusaha dalam bidang pengolahan yang bergerak pada usaha ini berasal dari penduduk lokal yang terdiri dari 7 kelompok pada tahun 2017 dengan total jumlah produksi olahan dari 7 kelompok ini sebesar 13.168 Kg. Kondisi tersebut disebabkan karena jenis ikan yang didaratkan umumnya beragam, serta terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang penguasaan teknologi pada hasil perikanan tersebut.

Secara umum pemodalan usaha perikanan di Kota Dumai berasal dari pengusaha lokal dan juga pendatang yang berinvestasi pada usaha tersebut. Investasi berupa penyediaan armada dan alat tangkap serta biaya operasional penangkapan. Sistem bagi hasil terkait usaha ini antara nelayan dan pengusaha bisa berupa rantai penjualan/pemasaran atau bagi hasil secara langsung di lapangan. Selain itu juga kurangnya peran koperasi perikanan dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari kelembagaan yang ada dimana Koperasi Perikanan tidak mampu bersaing dengan tauke atau agen dalam hal pemasaran maupun pelayanan. Sehingga membuat kepercayaan anggota terhadap tauke dan agen lebih tinggi dari pada koperasi. Koperasi yang tidak mampu melakukan pemasaran akan kalah saing tentunya dengan tauke. Sehingga anggota yang sudah terjerat dengan tauke tidak mampu berpartisipasi terhadap koperasi.

Permasalahan yang terjadi yaitu sulitnya memutuskan hubungan patron klien di daerah Dumai tersebut. Fungsi dan peran agen atau biasa di kenal tengkulak sudah sangat berperan

penting dalam kegiatan perikanan tersebut. Nelayan lebih suka meminjam kepada agen daripada koperasi meskipun mereka harus membayar agen 10% dari setiap hasil tangkapan yang diperoleh di luar membayar hutang mereka. Alasan nelayan lebih memilih agen karena mereka membutuhkan dana yang cepat. Hubungan informal antara nelayan dengan tauke cenderung merugikan nelayan. Peran tauke yang cukup besar terhadap kehidupan sosial ekonomi nelayan Kota Dumai membuat nelayan terus bergantung dan terikat dalam lingkaran hutang.

Selain itu, agen memberikan kemudahan dengan menjualkan hasil tangkapan nelayan meskipun akhirnya nelayan akan mengalami kerugian karena tidak semua agen jujur dan menjual hasil tangkapan secara tinggi. Sistem yang dilakukan agen tidak jauh berbedadengan tengkulak. Memberikan kemudahan yang ujung-ujungnya merugikan nelayan.

Dari konsep beberapa perhimpunan atau organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan pengembangan sumberdaya perikanan juga terdapat di Kota Dumai. Organisasi tersebut di antaranya HNSI Kota Dumai (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), PPNSI (Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia) serta kelompok-kelompok nelayan yang terdapat di beberapa kecamatan di Kota Dumai. Nelayan dan pelaku usaha perikanan juga membentuk kelompok pelaku usaha perikanan (POKMASWAS) dengan nama Pecinta Alam Bahari, Rindu Alam Bahari dimana pembinaan dan pengembangan kelompok diarahkan pada aspek manajemen, pengembangan usaha, pengembangan keterampilan dan kerjasama antar anggota dalam pengelolaan usaha.

Kelembagaan masyarakat nelayan Kota Dumai dalam mendukung program pembangunan perikanan meliputi; kelompok nelayan, kelompok masyarakat pengawas, kelompok pedagang dan pengolah ikan serta lembaga ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, masyarakat nelayan di kawasan ini perlu diberikan tambahan pengetahuan tentang kelestarian sumberdaya, jenis alat tangkap dan ukuran ikan yang layak ditangkap.

Penguatan pengaturan (*governance*) dan manajemen perikanan berkelanjutan diperlukan melalui penguatan kelembagaan sebagai berikut:

- (a) **Sistem Manajemen Perikanan**, khususnya penguatan kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Kelautan dan Perikanan, LSM Perikanan dan Kelautan, Organisasi Tingkat Propinsi dan Masyarakat Lokal.
- (b) **Sistem Monitoring, Control dan Surveillance (MCS)** termasuk kelengkapankapal patroli dan peran *FMS (Fisheries Monitoring System)*.
- (c) **Sistem Peradilan Perikanan** baik secara otonom maupun bagian dari **Sistem Peradilan Nasional**.
- (d) Penerapan **Co-Management** yang melibatkan masyarakat nelayan secara aktif.
- (e) Pengaturan **Hak Pemanfaatan Cadangan Ikan** secara bijak, efisien dan efektif.

3.1.2. Analisis *Stakeholder* dalam Pengembangan Perikanan

Dalam rangka membuat suatu strategi terkait pengembangan

perikanan yang di Kota Dumai, maka diperlukan suatu kerjasama dari berbagai pihak untuk merumuskannya. Berbagai *stakeholder* dianggap berperan penting dalam merumuskan suatu bentuk regulasi kebijakan. Adapun *stakeholder* tersebut adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi terkait, akademisi serta LSM. Tentunya masing-masing pihak memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda dalam merumuskan suatu kebijakan.

Analisis *stakeholder* sangat perlu dilaksanakan untuk menentukan pihak-pihak yang berkompeten dalam merumuskan arah regulasi kebijakan tersebut. Menurut Schmeer (2000) analisis ini merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara kualitatif dalam menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan ketika mengembangkan atau menerapkan suatu kebijakan. *Stakeholder* dapat diartikan sebagai individu, kelompok atau lembaga yang kepentingannya dipengaruhi oleh kebijakan atau pihak yang tindakannya secara kuat mempengaruhi kebijakan. Setiap *stakeholder* memiliki pengaruh dan kepentingan dalam kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan. *Stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi merupakan *stakeholder* primer dimana kepentingannya dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan. Sedangkan *stakeholder* sekunder, kepentingannya dipengaruhi secara tidak langsung. Daftar *stakeholder* serta pengaruh dan kekuatannya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Matriks Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder dalam Pengembangan Perikanan tangkap di Kota Dumai

Keterangan Stakeholder :

KKP RI (Ditjen Perikanan Tangkap), Disnakanla Kota Dumai, Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Dumai), Pemda (Pemerintah Daerah Kota Dumai), Dinas PU Kota Dumai, Dinas Perhubungan Kota Dumai, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Industri Kota Dumai, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Akademisi, Pemilik Unit Usaha Lokal, Masyarakat Lokal, Nelayan, Investor/Pengusaha Luar.

Kepentingan *stakeholder* dalam kebijakan pengembangan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dipengaruhi oleh faktor ekologi, sosial dan ekonomi. Pengaruh *stakeholder* yang berbeda-beda dalam kebijakan ini disebabkan oleh faktor politik, birokrasi dan struktural. Hasil dari kajian pada Tabel 1 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dalam kebijakan

pengembangan perikanan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Stakeholder yang dianalisis dalam penelitian ini adalah segenap pemangku kepentingan yang berkaitan dengan program-program pengembangan perikanan, baik berupa minapolitan, industri perikanan ataupun kebijakan lainnya dalam hal pengembangan perikanan. Hasil analisis *stakeholder* menetapkan beberapa *stakeholder* primer yang akan diikutsertakan dalam merumuskan strategi pengembangan perikanan di Kota Dumai. *Stakeholder* primer dalam pengembangan perikanan di Kota Dumai adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Dumai (DPKP) dan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Pemda). *Stakeholder* primer yang diperoleh pada tahapan analisis ini memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka menjawab tantangan

pengembangan ekonomi perikanan di Kota Dumai.

. Tabel 1. Analisis *Stakeholder* Pengembangan Sumberdaya Perikanan di Kota Dumai

No.	Stakeholder	Kriteria Evaluasi							Keputusan	
		Kepentingan	Siapa	Kekuatan			Pengaruh	Total		
				S	F	P			Keterlibatan	Tingkat Keterlibatan
1	KKP RI (Ditjen Perikanan Tangkap)	Perencanaan dan Pengembangan Minapolitan dan Program Perikanan lainnya	3	3	4	4	11	33	Terlibat	Pengambil Kebijakan
2	Disnakanla Dumai	Membina masyarakat nelayan, Koordinasi dengan instansi terkait.	3	3	4	4	11	33	Terlibat	Pengambil Kebijakan
3	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Membuat masterplan dan rencana strategis pengembangan perikanan, Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam mengembangkan perikanan	3	3	3	3	9	27	Terlibat	Pemberi Pertimbangan
5	Pemerintah Daerah	Melakukan inisiasi dan mengkoordinasikan program minapolitan dengan instansi terkait	3	3	4	4	11	33	Terlibat	Pengambil Kebijakan
6	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	Membangun prasarana dan sarana terkait pengembangan perikanan, Meningkatkan fasilitas perikanan	2	3	4	3	10	20	Terlibat	Penerima Informasi
7	Dinas Perhubungan	Meningkatkan sarana dermaga/pelabuhan dan jalan raya di kawasan minapolitan	2	3	3	3	9	18	Diabaikan	Penerima Informasi
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan sarana industri perikanan, Meningkatkan sarana perdagangan domestik dan internasional, Penyediaan sarana bahan bakar armada penangkapan	2	3	3	3	9	18	Terlibat	Penerima Informasi
9	LSM	Memberikan pengetahuan dan pendampingan terkait pengelolaan sumberdaya perikanan, Melakukan kontak langsung dengan masyarakat nelayan	2	3	3	2	8	16	Diabaikan	Penerima Informasi

No.	Stakeholder	Kriteria Evaluasi							Keputusan	
		Kepentingan	Sikap	Kekuatan			Pengaruh	Total		
				S	F	P			Keterlibatan	Tingkat Keterlibatan
10	Akademisi	Meningkatkan dan menguatkan peranan SDM di bidang perikanan, Riset dan pengabdian masyarakat di bidang perikanan	3	3	2	2	7	21	Diabaikan	Pemberi Pertimbangan
11	Pemilik Unit Usaha Lokal	Meningkatkan kesejahteraan, Meningkatkan aktivitas ekonomi	3	2	3	2	7	21	Diabaikan	Pemberi Pertimbangan
12	Masyarakat Lokal	Memperoleh pekerjaan, Meningkatkan kesejahteraan	2	2	2	1	5	10	Diabaikan	Penerima Informasi
13	Nelayan	Meningkatkan kesejahteraan	3	4	1	1	6	18	Diabaikan	Penerima Informasi
14	Investor/Pengusaha Luar	Membuka lapangan pekerjaan, Meningkatkan keuntungan	2	2	5	2	9	18	Diabaikan	Penerima Informasi

3.2. Strategi Pengembangan Perikanan Kota Dumai

Berdasarkan isu strategis, analisis *gap* antara pelaksanaan program dengan output yang diharapkan dapat disusun strategi pengembangan perikanan Kota Dumai.

3.2.1. Analisis Faktor Internal (IFAS)

Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dalam pengembangan perikanan Kota Dumai antara lain:

a. Potensi sumberdaya ikan

Kota Dumai memiliki potensi perikanan tangkap serta memiliki wilayah khusus yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang berbasis perikanan tangkap dan budidaya (Minapolitan) sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2010 yang telah mulai dikembangkan di Desa Penempul Kecamatan Sungai Sembilan.

b. Adanya kelompok nelayan yang aktif

Nelayan di Kota Dumai memiliki kelompok nelayan di tiap-tiap daerahnya dengan total kelompok aktif sebanyak 36 kelompok dengan jumlah anggota 624 yang tersebar di 5 kecamatan. Kelompok-kelompok nelayan ini merupakan binaan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat.

c. Tersedianya Fasilitas penunjang

Kota Dumai telah memiliki PPI yang terbilang cukup lengkap dimana PPI tersebut dilengkapi dengan tempat lelang, pabrik es, tangki bahan bakar, *cold storage*, bahkan laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan.

d. Dukungan Dinas Perikanan dan Kelautan dan pemerintah Daerah

- Dukungan Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan

nelayan dengan berbagai program pemberdayaan baik dengan pendanaan dari APBD maupun APBN.

- Adanya perlindungan terhadap alat tangkap statis yang selanjutnya akan ditetapkan dalam PERDA.

Adapun faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan dalam pengembangan perikanan Kota Dumai antara lain:

- a. Keterbatasan permodalan dan peralatan tangkap.
Keterbatasan modal dan peralatan tangkap merupakan masalah klasik dan utama bagi nelayan.
- b. Rendahnya sumberdaya manusia nelayan

- Tingkat pendidikan nelayan yang umumnya rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan adaptasi teknologi juga rendah sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan nelayan.

- Dengan pendidikan yang rendah, nelayan mengelola kegiatan usahanya dengan manajemen yang sederhana sehingga hasil usahanya tidak efisien.

- c. Penggunaan teknologi yang masih rendah dalam pengolahan hasil perikanan.
- d. Program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kurang bersinergi dan sering tidak tepat sasaran.

Tabel.3. Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS)

No	Faktor Internal	Bobot	Nilai	Skor
Kekuatan				
1	Potensi sumberdaya perikanan laut	0.18	4	0.72
2	Adanya kelompok nelayan yang aktif	0.16	3	0.48
3	Tersedianya Fasilitas penunjang	0.15	3	0.45
4	Dukungan Dinas Perikanan dan Kelautan dan pemerintah Daerah	0.11	3	0.33
	Sub Jumlah			1.98
Kelemahan				
1	Keterbatasan permodalan dan peralatan tangkap	0.15	3	0.45
2	Rendahnya sumberdaya manusia nelayan	0.14	2	0.28
3	Program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kurang bersinergi dan sering tidak tepat sasaran	0.11	2	0.22
	Sub Jumlah	1.00		0.85
	Jumlah Total			3.83

3.2.2. Analisis Faktor Eksternal (EFAS)

Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dalam pengembangan perikanan Kota Dumai antara lain:

- a. Peluang pasar yang besar
Di tingkat lokal, konsumsi ikan oleh masyarakat terus meningkat sehingga hasil produksi perikanan Kota

Dumai lebih banyak untuk konsumsi lokal.

- b. Lokasi geografis
Kota Dumai yang berdekatan dengan Selat Malaka memberikan keuntungan dalam kegiatan perdagangan dengan Negara tetangga. Selama ini, produk perikanan yang diekspor melalui pelabuhan Dumai berasal dari perikanan tangkap

Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hal ini merupakan peluang besar jika mampu dilakukan oleh nelayan dari Dumai.

c. Peluang untuk bekerjasama dengan Pengusaha Luar Daerah

Kota Dumai telah memiliki keunggulan dalam menarik investor dibanding daerah lain di Provinsi Riau karena memiliki infrastruktur yang cukup memadai seperti pelabuhan dengan taraf internasional serta PPI dengan fasilitas yang cukup lengkap.

Adapun faktor-faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam

pengembangan perikanan Kota Dumai antara lain:

- Penurunan kualitas perairan
Bagi nelayan tangkap, penurunan kualitas perairan berdampak pada penurunan jumlah ikan sehingga hasil tangkapan menurun.
- Kenaikan harga bahan kapal penangkap ikan menyebabkan tingginya biaya penyusutan
- Selektivitas alat tangkap belum diterapkan

Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif dapat merusak ekosistem perairan yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah ikan.

Tabel 4. Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

No	Faktor Eksternal	Bobot	Nilai	Skor
Peluang				
1	Peluang pasar yang besar	0.18	4	0.72
2	Peluang untuk bekerjasama dengan Pengusaha Perikanan Luar Daerah	0.16	3	0.48
3	Pemanfaatan Kondisi Geografis untuk ekspor	0.16	4	0.64
	Sub Jumlah			1.48
Ancaman				
1	Penurunan kualitas perairan (pencemaran)	0.18	3	0.54
2	Peningkatan Harga Bahan Kapal penangkap ikan	0.17	3	0.51
3	Selektivitas alat tangkap belum diterapkan	0.15	2	0.30
	Sub Jumlah	1.00	17	1.35
	Jumlah Total			2.83

3.2.3. Matrik Analisis SWOT

Dari nilai total masing-masing faktor, selain dapat digambarkan dalam diagram SWOT juga disajikan dalam

rumusan matrik SWOT, yang akan menggambarkan nilai skor dari masing-masing kombinasi strategi seperti yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Skor Matriks SWOT dan Rencana dan Strategi Pengembangan Perikanan Laut

IFAS	KEKUATAN	KELEMAHAN
EFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
PELUANG	STRATEGI SO	STRATEGI WO
OPPORTUNITY (O)	1.48 + 1.98 = 3.36	1.48 + 0.85 = 2.33
ANCAMAN	STRATEGI ST	STRATEGI WT
THREAT (T)	1.35 + 1.98 = 3.33	1,35 + 1,09 = 2,44

Dari matriks SWOT diatas diketahui bahwa Strategi Pengembangan

Perikanan Tangkap Dumai adalah strategi SO, yaitu strategi

memanfaatkan semua peluang dan memaksimalkan semua kekuatan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal serta program yang dicanangkan pemerintah maka dapat disusun strategi pengembangan perikanan Kota Dumai sebagai berikut:

1. Strategi S-O

- a. Pembinaan kelompok nelayan (S2, O1)
- a. Pembinaan kelompok nelayan aktif yang berjumlah 46 kelompok perlu diintensifkan agar kelompok tersebut memiliki peningkatan posisi tawar dan kemampuan manajemen.
- b. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas penunjang perikanan seperti TPI/pelabuhan (S3, O2) oleh nelayan sebagai penunjang pemasaran hasil tangkapan dan penjamin mutu hasil tangkapan. Fasilitas penunjang usaha perikanan seperti TPI/pelabuhan yang dimiliki Kota Dumai relative lengkap namun pemanfaatannya belum optimal.

2. Strategi S-T

Penegakan hukum bagi pelanggaran lingkungan dan IUU fishing (S5, T2, T4, T5). Pelanggaran hukum seperti *illegal fishing* dan pencemaran lingkungan perlu penindakan tegas oleh Pemerintah

3. Strategi W-O

Perberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan (W1, W2, O1, O3). Salah satu hal penting tidak berdayanya nelayan adalah tidak berfungsi kelembagaan yang ada pada masyarakat nelayan. Diperlukan penguatan kelembagaan nelayan yang mampu meningkatkan kemampuan nelayan sehingga mereka “berdaya” dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

d) Strategi W-T

Orientasi Revitalisasi kelompok dalam mengakses permodalan (W1, T3). Ketidakmampuan nelayan dalam mengakses permodalan salah satunya dikarenakan ketidakpercayaan lembaga keuangan untuk memberikan modal. Dibutuhkan daya untuk meningkatkan posisi tawar mereka yaitu minimal oleh organisasi kelompok melalui pemanfaatan dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat.

Tabel 6. Matriks SWOT dan Strategi Pengembangan Perikanan Laut

<div style="text-align: center;"> Internal Eksternal </div>	<u>Kekuatan (S)</u> a. Potensi sumberdaya ikan b. Adanya kelompok nelayan yang aktif c. Tersedianya Fasilitas penunjang d. Dukungan Dinas Perikanan dan Kelautan dan pemerintah Daerah	<u>Kelemahan (W)</u> a. Keterbatasan permodalan dan peralatan tangkap b. Rendahnya sumberdaya manusia nelayan c. Program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kurang bersinergi dan sering tidak tepat sasaran
	<u>Peluang (O)</u> a. Peluang pasar yang besar baik pasar lokal maupun luar negeri. b. Adanya peluang untuk bekerjasama dengan pengusaha luar daerah c. Memanfaatkan potensi geografis yang strategis	<u>Strategi SO</u> + Optimalisasi produksi untuk memenuhi permintaan pasar (S1, S3, O1, O3) + Pembinaan kelompok nelayan (S2, O1) + Optimalisasi pemanfaatan fasilitas penunjang perikanan seperti TPI/pelabuhan (S4, O2)
	<u>Ancaman (T)</u> a. Penurunan kualitas perairan b. Peningkatan harga bahan kapal penangkap ikan c. Selektivitas alat tangkap belum diterapkan	<u>Strategi WO</u> + Perberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan dan permodalan (W1, W3, O1, O3). + Pendampingan dan bimbingan usaha nelayan oleh stakeholder (W2, W3, O1)
	<u>Strategi ST</u> + Pencegahan penggunaan bahan dan cara berbahaya dalam menangkap ikan untuk mengimbangi kerusakan lingkungan akibat pencemaran (S5, T1)	<u>Strategi WT</u> + Revitalisasi kelompok untuk meningkatkan mengakses permodalan (W1, T3)

Dari hasil analisis SWOT terdapat sejumlah alternative strategi pengembangan perikanan Kota Dumai. Pemilihan prioritas strategi berdasarkan

rangking dengan nilai tertinggi, seperti ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Alternatif Pemilihan Strategi Pengembangan Perikanan Kota Dumai

Unsur SWOT	Keterkaitan	Jumlah Skor	Rangking
SO1	S1, S3, O1, O3	2.53	1
SO2	S2, O1	0.96	6
SO3	S2, O1, O3	1.17	4
SO4	S4, O2	0.81	8
WO1	W1, W3, O1, O3	2.03	2
WO2	W2, W3, O1	1.14	5
ST1	S3, T1	0.87	7
ST2	S4, T1, T2, T3	1.68	3
WT1	W1, T3	0.75	9

Berdasarkan hasil perhitungan prioritas strategi melalui rangking, tiga alternative strategi dengan nilai tertinggi adalah:

- Keberdayaan dan Pemberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan untuk optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang ada
- Optimalisasi pemanfaatan fasilitas penunjang perikanan sebagai media untuk peningkatan pendapatan nelayan
- Penguatan permodalan usaha nelayan dengan memanfaatkan peluang dari program pemerintah maupun lembaga permodalan swasta yang ada
- Memenuhi peluang pasar yang telah ada dan perkembangannya bekerjasama dengan pengusaha dari luar daerah untuk mengantisipasi kenaikan produksi
- Pemanfaatan kondisi geografis yang strategis untuk kegiatan ekspor ke luar negeri untuk ikan yang berkualitas ekspor.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- Untuk melakukan pengembangan sumberdaya perikanan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, maka perlu adanya perhatian dan kebijakan dari stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap kelembagaan yang mengelola sumberdaya ini. Hasil analisis stakeholder menetapkan penataan kelembagaan perikanan di kota Dumai yang utama adalah penguatan kelompok nelayan sebagai wadah peningkatan kontribusi lembaga pemasaran dan masuknya lembaga permodalan ke dalam usaha perikanan Kota Dumai untuk meminimalisir peran tengkulak, serta memberikan ruang untuk kelembagaan pengawasan perikanan untuk kelestarian sektor perikanan. Beberapa stakeholder primer dalam merumuskan kebijakan pengembangan perikanan di Kota Dumai. Stakeholder primer tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Dumai (DPKP) dan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Pemda). Perlu pengawasan yang lebih baik oleh stakeholder yang terlibat dalam pengembangan perikanan di Kota Dumai dengan melakukan pembatasan penerbitan izin penangkapan bagi armada baru sehingga sumberdaya dapat pulih serta perlu adanya pengendalian, pemantauan dan pengawasan serta penegakan hukum dengan sanksi yang kuat dengan efek jera dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di Kota Dumai.

2. Dari analisa SWOT, strategi untuk pengembangan perikanan tangkap di Kota Dumai dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang yang ada yaitu pemberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan untuk optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang ada, pemanfaatan fasilitas penunjang perikanan sebagai media untuk peningkatan pendapatan nelayan, penguatan permodalan usaha nelayan dengan memanfaatkan peluang dari program pemerintah maupun lembaga permodalan swasta yang ada, memenuhi peluang pasar yang telah ada dan perkembangannya dan bekerjasama dengan pengusaha dari luar daerah untuk mengantisipasi kenaikan produksi serta pemanfaatan kondisi geografis yang strategis untuk kegiatan ekspor perikanan ke luar negeri untuk ikan yang berkualitas ekspor.

4.2. Saran

Sebagai saran bagi *stakeholder* dan kelembagaan perikanan tangkap di kota Dumai adalah :

1. Dalam penataan kelembagaan perikanan tangkap pihak stakeholder selalu beredoman kepada kepentingan pelaku utama.
2. Perlu evaluasi dan pengawalan setiap program yang dijalankan secara terperinci dan terpadu .
3. Pihak pelaku utama dan kelembagaan perikanan di kota Dumai perlu kesadaran untuk menjalankan program pemerintah yang tujuan adalah untuk kepentingan bersama bukan mencari untuk kepentingan pribadi
4. Menetapkan konsekwensi yang harus diterima oleh pihak pelaku utama dan kelembagaan yang menyelewengkan program atau strategi pembangunan perikanan kota Dumai yang ditetapkan.
5. Pihak pelaku utama tetap selalu menjaga kualitas hasil tangkapan sampai ke konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles Lamb, W.et.al. 2001. Pemasaran. Edisi : Pertama, Salemba Empat : Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Pustaka Setia. Bandung.
- Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Provinsi Riau. 2011-2017. Statistik Perikanan Kota Dumai Provinsi Riau Tahun 2011-2017. Dumai. 74 hal.
- Hazmi, A. 2014. Kebijakan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Kota Dumai Propinsi Riau. Program Pasca Sarjana Universitas

- Riau Tesis. Tidak Diterbitkan 186 hal.
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ostrom E et al. 1994. Rules, Games and Common-pool Resources. USA: The University of Michigan Press.
- Rangkuti, F. 2004. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sanim B. 2002. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Kumpulan Materi Kuliah). Tidak dipublikasikan. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Schmeer K. 2000. Stakeholder Analysis Guidelines. In: Schribner ES and Brinherhoff D (editor). Policy Toolkit for Strengthening Health Sektor Reform 2: 1-43. Bethesda MD. Abt Associates Inc.
- Umar, Husein. 2003. Strategic Management In Action : Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David, Dan Wheelen-Hunger. Jakarta: Gramedia.